

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam Disertasi ini maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas fungsi Bapemperda dalam proses pembentukan peraturan daerah yang terdiri atas subfokus penelitian yakni; a) Karakteristik organisasi sudah baik, hanya perlu ada pengembangan secara berkelanjutan guna menjadikan fungsi Bapemperda lebih efektif; b) Karakteristik Lingkungan merupakan indikator penelitian di Bapemperda sudah baik karena ada dukungan dari semua unsur yang berkaitan dengan Bapemperda DPRD Bone Bolango; c) Karakteristik Pekerja (Individu) di Bapemperda menunjukkan sudah baik, hanya saja perlu ada sinergitas kesamaan persepsi serta pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab, dan; d) Kebijakan dan Praktik Manajemen menunjukkan belum maksimal.
2. Faktor-faktor yang menentukan efektifitas fungsi Bapemperda dalam pembentukan peraturan daerah yang terdiri atas sub fokus penelitian; a) Faktor SDM menunjukkan belum maksimal, hal ini terlihat dari pemahaman fungsi legislasi anggota Bapemperda belum merata; b) Faktor Penganggaran sudah baik, namun Bapemperda cenderung kurang serius dalam mengelola anggaran yang dalam

perencanaannya tidak sejalan dengan realisasi serapan anggaran setiap tahunnya; c) Faktor Mekanisme kerja terlihat sudah cukup baik, hanya perlu peningkatan kerja sama dalam memadukan mekanisme kerja fungsi Bapempreda; d) Faktor Sumberdaya menunjukkan cenderung belum maksimal, terlihat dari kurangnya dukungan fasilitas dan tenaga ahli, kedepannya diharapkan mendapat porsi lebih, dan; e) Faktor Masyarakat dan Pemerintah Daerah menunjukkan sudah baik, hanya saja masih ada persepsi dari sebagian masyarakat terkait akses informasi yang bisa diperoleh masyarakat masih terbatas.

B. Implikasi

Berorientasi pada simpulan diatas maka peneliti dapat merumuskan implikasi sebagai berikut:

1. Efektivitas fungsi bapemperda dalam pembentukan rancangan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu menekankan pada pentingnya peran serta masyarakat dalam merumuskan Peraturan Daerah
2. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas penyusunan propemperda dalam pembentukan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango harus mempertimbangkan aspek *the right man on the right place*, dalam artian anggota Bapemperda harus diisi oleh SDM yang paham akan proses pembentukan Perda

C. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas maka dapat dirumuskan beberapa saran penelitian yaitu:

1. Diharapkan Bapemperda DPRD Bone Bolango meningkatkan efektifitas fungsinya dengan peningkatan pengetahuan anggota terkait fungsi legislasi melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Memberikan motivasi bagi anggota Bapemperda dengan memfasilitasi kebutuhannya dalam meningkatkan kemampuan secara struktural dan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Perda yang di tetapkan.
3. Selalu melibatkan semua unsur terkait guna jejaring kerja sama serta informasi valid terkait masalah dan kebutuhan masyarakat.
4. Amanah dan mampu menjadi representasi masyarakat dalam menyambungkan aspirasi melalui produk kebijakan yang berpihak pada kebutuhan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Nurul, 2004. DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah. Jakarta. LIPI Press
- Agus Tulus, Moh. et al. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Abdullah Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Derah Tingkat II dan Perkembangannya, Manda Maju, Bandung, 1991.
- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia.
- Amiroeddin Syarif. 1987. Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta.
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Cet . Kedua. 2004. FH Ull Press, Yogyakarta
- Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung
- Bernardin and Russel, 1993. Human Resource Management. New Jersey: International Editions Upper Saddle River, Prentice Hall
- Brotoharsojo, Hartanto & Wungu, Jiwo, 2003, Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan *Merit System*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Budiyono, Haris. 2008. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT. Bhumi Aksara
- Budihardjo, A. 2002. Mengenal Organizational Citizenship Behavior (OCB). Forum Manajemen Prasetiya Mulya Tahun ke-XVIII, No. 82 April 2004
- Budiarjo, Meriam. (1993). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cheema, G Shabbir & Rondinelli, Dennis A, 1983, "*Decentralization and Development*", Sage Publication, Inc.
- Choppy Haricahyono, 2001, Ilmu Politik Dan Prespektifnya Swadaya Politik Masyarakat, (Jakarta; Arbi Sanit).

- Dessler, Gary. 2008. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Refika Aditam
- Dwiyanto, Agus. 2006. "Transparansi Pelayanan Publik", dalam Agus Dwiyanto, ed. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1996. Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Gibson, James L. et al. (1996). Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Haris, Syamsuddin. (2007), Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Pres.
- Hardjana, A. M. 2001. *Training SDM yang Efektif*. Yogyakarta: Kanisius
- Hardjito, Dydiat. 1997. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian Edisi: I. Jakarta: RajaGrafindo
- Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Keban, Jeremias T". 1995. "Indikator Kinerja Pemerintah Daerah", Yogyakarta: UGM
- Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal dan Pembangunan Daerah. Madang : BPFE UNIBRAW
- Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lembaga Administrasi Negara, 1999, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Jakarta
- Loftland. 2004. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Raja. Grafindo, Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marbun et all, 2004, Kamus Manajemen. Media Pustaka, Jakarta
- Matindas, R. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia; lewat Konsep Aku (ambisi, kenyataan dan usaha). Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mitfah, Thoha. 2012. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Moenir, H.A.S., 1992, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu, 2012. Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia,.
- Otong Rosadi, 2008, Studi Politik Hukum, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Thafa Media.
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1992, *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Addison-Wesley.
- Pasolong Harbani. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung : CV. Alfabeta.
- Pramusinto, Agus dan Purwanto, Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Prawirosentono, Suyadi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Jakarta, Yasrif Watampone
- Rasyid, Ryaas, dkk. 2004. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ramly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2004.
- Said, Mas'ud. M L. 2005. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. UMM Press, Malang.
- Siagian, H. 1997, Manajemen Suatu Pengantar, Alumni Bandung.
- Stepen P Robbins. 2009. Perilaku Organisasi Jilid I. Alih Bahasa. Jakarta; PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Steers, M. Richard. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Simamora, Henry. 1997. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Yogyakarta. STIE YKPN
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Hal. 3-9. PT. Refika Aditama. Bandung
- Srijanti & A. Rahman. Etika Berwarga Negara. (ed.2). Jakarta: Salemba Empat, 2008.

- Syaukani, Affan Gaffar dan M.Ryass Rasyid. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar Kedsama dengan PUSKAP, Yogyakarta,
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Tika, P. (2006). Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, 2006. "Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari KKN", dalam Agus Dwiyanto, ed .2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wilson, Woodrow. 1887. *The Study of Administration*. Political science quarterly 2 (2): 197–222. Diunduh 8 Februari 2013.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insani Cendikia, Surabaya
- Zuhro, R.Siti, dkk. 2009. Demokrasi Lokal (Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali). Yogyakarta: Ombak.

JURNAL:

- Ade Suraeni, 2010, Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah (makalah), disampaikan pada diklat legal drafting badan pendidikan dan pelatihan *Jurnal-Hutchcroft*, Paul D. 2001. "*Centralization and decentralization in administration and politics: assessing territorial dimensions of authority and power.*" *Governance* 14.1 : 23-53).
- Ade M. Yuardani dan Mahendra Jaya dalam Jurnal Eksos Vol.2 No. 3 Tahun 2013. Judul "Kemampuan dan Kredibilitas Anggota DPRD".
- Eka N.A.M. Sihombing dengan judul "Problematika Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah" yang dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 03 (September 2016)
- Nonet dan Selznick dalam Jurnal Legislasi Indonesia "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" (Vol. 8 No 4 2001
- Sariadi, S. (2013). Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bagian Sekretariat TNI Al Lantamal VIII Di Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).

Nurkholis dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 (2012) diantaranya: (Suahazil Nazara dan Nurkholis, "Evaluasi Pemekaran Wilayah Kabupaten 142-143)

<http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2014/02/26/katalog-produk-hukum-dari-tahun-1945-sd-2014-update-februari-2014>, Katalog Produk Hukum dari Tahun 1945 s.d 2014. Diakses pada hari minggu tanggal 6 juli 2016 pada pukul 23.00 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah

Peraturan Pemerintah yang meyangkut masalah Pemekaran Daerah No 78 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah